



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)  
PERANGKAT DAERAH DPMPTSP PROV. KALTIM  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telepon (0541) 74235, 74387, Fax. (0541) 736446  
S A M A R I N D A 7 5 1 1 2



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website : <http://dpmptsp.kaltimprov.go.id> email : [dpmptsp.kaltim@gmail.com](mailto:dpmptsp.kaltim@gmail.com),  
[dpmptsp@kaltimprov.go.id](mailto:dpmptsp@kaltimprov.go.id) email PTSP : [iso.ptspbppmd@gmail.com](mailto:iso.ptspbppmd@gmail.com), twitter : @dpmptsp\_kaltim  
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446  
SAMARINDA 75112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Nomor : ~~073~~.1./~~021~~.../DPMPTSP-SEKR/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Memimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun yang terdiri dari bidang-bidang teknis dan sekretariat agar Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang disusun lebih proporsional dan sejalan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- b. Bahwa untuk keperluan Penyusunan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan Tim Penyusun.
- c. Untuk mendukung dan menginventarisir dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kebijakan, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian tugas dari TIM, dan bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusun sebagaimana disebutkan pada huruf (b) diatas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;  
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;  
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;  
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;  
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;  
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;  
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;  
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008;  
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008;  
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada dicantum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas ;
1. Menyusun draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Melakukan Evaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun berjalan sebagai bahan penetapan kinerja pada tahun berikutnya;
  3. Menyusun data-data Program dan Kegiatan pada tahun berikutnya yang akan dikompilasi sebagai bahan SIPD pada tahun selanjutnya;
- KETIGA : Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Tim memperhatikan arah dan kebijakan Penanaman Modal Nasional, dan Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, yang terintegrasi dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda.  
Pada Tanggal : 11 Januari 2020



Kepala,

**PUGUH HARJANTO, S.STP., M.SI**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197908101998021001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : ~~013.1.021~~/DPMPTSP-SEKR/2021, Tanggal Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;

---

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENJA KERJA (RENJA)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

---

- I. Penanggung Jawab : Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
- II. Ketua : Asbudin, ST., M.Si (Kasubbag Perencanaan Program)  
DPMPTSP Prov. Kaltim
- III. Sekretaris : Arianto Effendi, S.Sos
- Seksi – Seksi :**
1. Seksi Pengumpulan data : 1. Anita Tyas Fachlizha, SE  
2. Ence Deasy Yuniasari, S.S  
3. Febrisma Ramadhiya Findarti, S.AB  
4. Roni Helpani, SP
2. Seksi Pengetikan/Input data : Belin Ruruk, S.Kom
3. Tim Korektor : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal  
2. Kepala Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha  
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan  
4. Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan  
5. Kepala Bidang Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan
- 

Samarinda, 11 Januari 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Timur,

Kepala,



RUGUH HARJANTO, S.STP., M.SI

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197908101998021001

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya, **Rencana Kerja Perangkat Daerah** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini dapat kami susun.

Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 mengalami perubahan program kegiatan yang dilandasi oleh Permendagri No. 90 Tahun 2019. Rencana Kerja untuk tahun anggaran 2022 terdiri 6 Program, 13 Kegiatan dan 37 Sub. Kegiatan, dari 6 program tersebut terdapat 2 (dua) program prioritas yaitu **Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** yang sebagai wujud komitmen kami untuk meningkatkan realisasi investasi dengan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan investasi yang sejalan dengan menciptakan Pelayanan Penanaman Modal yang mudah, cepat, murah, tepat dan transparan terhadap Calon Investor akan terus kami bangun dan kembangkan serta memberikan informasi mengenai potensi-potensi daerah.

Demikian rencana kerja ini disampaikan, untuk menjadi bahan masukan dan pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Samarinda, 26 Juli 2021

Kepala,



**ENGLIH MARJANTO, S.STP., M.SI**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197908101998021001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang.....	01
1.2	Landasan Hukum.....	02
1.3	Maksud dan Tujuan .....	03
1.4	Sistematika Penulisan .....	04

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020**

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2020 dan Capaian Realisasi Terhadap Renstra PD .....	05
2.1.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD T.A 2020.....	05
2.1.2	Belanja Tidak Langsung.....	06
2.1.3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .....	07
2.1.4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	08
2.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah.....	09
2.1.6	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan.....	10
2.1.7	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan .....	11
2.1.8	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi.....	14
2.1.9	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM..	16
2.1.10	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan.	18
2.1.11	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha .....	19
2.1.12	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	21
2.2	Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	22
2.3	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
2.4	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	27
2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	29
2.6	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kab/Kota.....	35

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1	Tela'ahan Kebijakan Nasional.....	37
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD .....	39
3.2.1	Tujuan.....	39
3.2.2	Sasaran Program Kegiatan.....	39
3.3	Program Kegiatan .....	40
3.3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah..	41

	3.3.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal .....	44
	3.3.3	Program Promosi Penanaman Modal .....	45
	3.3.4	Program Pelayanan Penanaman Modal .....	46
	3.3.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....	47
	3.3.6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal .....	49
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	4.1	Perumusan Program Prioritas .....	50
	4.2	Rencana Pendanaan Perangkat Daerah.....	50
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	57

Lampiran :

1. Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
2. Agenda Kerja Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
3. Berita Acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2022

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Realisasi Keuangan per 31 Desember 2020 .....	05
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan BTL .....	06
Tabel 2.3	Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg PAP .....	07
Tabel 2.4	Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg Sarpras .....	08
Tabel 2.5	Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg Peningkatan Kapasitas .....	09
Tabel 2.6	Realisasi Kegiatan Rengram.....	10
Tabel 2.7	Realisasi Kegiatan Bidang LP2N .....	11
Tabel 2.8	Realisasi Kegiatan Bidang DALAK.....	14
Tabel 2.9	Realisasi Kegiatan Bidang P2IPM .....	16
Tabel 2.10	Realisasi Kegiatan Bidang YANDU .....	18
Tabel 2.11	Realisasi Kegiatan Bidang P2M .....	20
Tabel 2.12	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Tahun Anggaran 2019 .....	23
Tabel 2.13	Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2022 Provinsi Kalimantan Timur .....	30
Tabel 3.1	Matriks RPJPD Prov. Kaltim.....	37
Tabel 3.2	Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama).....	40
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2021.....	50
Tabel 4.2	Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Tahun 2021 .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun lalu telah memberikan hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun bukan berarti permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur menyurut. Sebaliknya, era liberalisasi ekonomi yang terus bergulir menawarkan banyak tantangan. Permasalahan pembangunan menjadi kian kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Oleh karenanya, penting bagi segenap komponen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kembali apa dan bagaimana wajah Provinsi Kalimantan Timur kini dan masa akan datang, lalu merangkaikannya dalam perencanaan pembangunan secara lebih baik, fokus, dan konsisten.

Salah satu upaya agar kita dapat memproyeksikan diri di masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang masih terus mengiringi, dan isu strategis apa yang harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur untuk dikembangkan demi meningkatnya kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini merupakan jabaran dari Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan merupakan operasionalisasi dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023. Rencana Kerja memuat gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun (Tahun 2022) serta menjawab apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar yang menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah sbb ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Tata Cara Rancangan Perda, RPJPD dan RPJMD) serta Tata Cara Perubahan (RPJPD, RPJMD dan RENJA Pemda) ;
9. Permendagri No. 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kaltim ;
12. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ;
13. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Kerja ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai kurun waktu setahun yang lalu, disertai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam realisasi dan operasionalisasi program

dan kegiatan serta proyeksi dan target yang diharapkan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan setahun berjalan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Anggaran dan Capaian Realisasi Terhadap Renstra PD
  - 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Anggaran
  - 2.1.2 Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Tela'ahan Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Perumusan Program Prioritas
- 4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2020 dan Capaian Realisasi Terhadap Renstra PD

Bab ini memuat revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.

##### 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Anggaran 2020

Tabel 2.1 Rekapitulasi Realisasi Keuangan per 31 Desember 2020

Realisasi Keuangan Per 31 Desember 2020					
Jenis Belanja	APBD-MURNI	APBD-P	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	9.308.012.000	432.000.000	9.740.012.000	6.467.860.935	66,41
Belanja Langsung	19.067.691.080	-2.803.942.290	16.263.748.790	11.544.714.936	70,98
<b>Total</b>	<b>28.375.703.080</b>	<b>-2.371.942.290</b>	<b>26.003.760.790</b>	<b>18.012.575.871</b>	<b>69,27</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran SIMDA Keuangan per 31 Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah murni dan anggaran perubahan (APBD-P) pada tahun anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 26.003.760.790,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 9.740.012.000,- dan Belanja Langsung Rp. 16.263.748.790,-. Berikut Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja sbb :

### 2.1.2 Belanja Tidak Langsung

Pada kegiatan ini merupakan penganggaran belanja wajib mengikat atau dalam arti lain pembiayaan penggajian/ tunjangan seperti, pembayaran gaji pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Jabatan, Iuran Asuransi Kesehatan, Biaya Insentif, pembiayaan Tunjangan Hari Raya dan pembiayaan tunjangan lainnya.

Tabel 2.2 Realisasi Keuangan BTL

Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung (BTL)				
Jenis Belanja	Pagu APBD-P	Realisasi	Silpa	%
Belanja Tidak Langsung	9.308.012.000	6.467.860.935	3.272.151.065	66,41

Sumber : Laporan Kartu Kendali Belanja Tidak Langsung SIMDA

Pada tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung (BTL) memiliki serapan anggaran yang cukup rendah dari target yang diinginkan, adapun kendala yang menyebabkan rendahnya serapan sebagai berikut :

1. Terdapatnya beberapa pegawai yang pensiun sehingga anggaran yang sudah dialokasikan tidak dapat direalisasikan.

2. Terjadinya mutasi staf dan pejabat eselon yang di total mencapai 6 orang pegawai

### 2.1.3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (PAP), yang dimana didalam kegiatan ini merupakan penganggaran untuk kegiatan operasional seperti, pembayaran gaji non PNS, biaya listrik, air, telepon, biaya *fotocopy*/cetak/penggandaan, honor-honor pengelola keuangan dan pembayaran operasional lainnya untuk mendukung kegiatan perkantoran.

Tabel 2.3 Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg PAP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
Kegiatan	Target		Realisasi			%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu	
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	3.829.194.330	12 Bulan	3.580.927.986	100	93,52	
<b>Pengukuran Kinerja Program</b>	<b>72 SKM</b>	<b>3.829.194.330</b>	<b>87 SKM</b>	<b>3.580.927.986</b>	<b>120</b>	<b>93,52</b>	

Sumber : a. Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA  
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pada tabel 2.3 diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan kegiatan operasional pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan baik, walaupun terdapat jumlah sisa anggaran. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp3.829.194.330,00 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp3.580.927.986,00 atau 93,52%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp2.798.980.062,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp781.947.924,00 atau 27,94%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan adanya

efisiensi anggaran dan beberapa kegiatan yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.829.194.330,00 dan terealisasi sebesar Rp3.580.927.986,00 atau 93,52%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp2.798.980.062,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp781.947.924,00 atau 27,94%. Masih terdapat sisa anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan beberapa kegiatan yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan seperti belanja Bahan Bakar Minyak, telepon, air, listrik dan pajak kendaraan bermotor.

#### 2.1.4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana, yang dimana didalam kegiatan ini merupakan penganggaran pengadaan sarana dan prasarana seperti kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan pengadaan barang/ belanja modal.

Tabel 2.4 Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg Sarpras

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	14 Paket	903.810.000	14 Paket	869.770.000	100	96,23
Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12 Bulan	914.331.960	12 Bulan	694.971.900	100	76,01
<b>Pengukuran Kinerja Program</b>	<b>6 Unit</b>	<b>1.818.141.960</b>	<b>6 Unit</b>	<b>1.564.741.900</b>	<b>100</b>	<b>86,06</b>

Sumber : a. Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA  
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pada tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa didalam kegiatan ini terdapat belanja barang modal berupa peralatan dan perlengkapan kerja seperti pengadaan

komputer, printer, mesin scanner, kamera, pendingin ruangan, televisi, tabung pemadam, notebook/ laptop, UPS (stabilizer) pada perangkat komputer serta perlengkapan peralatan sarana dan prasarana. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang ditetapkan telah tercapai. Adapun sisa anggaran berasal dari sisa-sisa pengadaan dan ada beberapa kegiatan yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan.

### 2.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp3.989.725.000,00 pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp3.011.591.750,00 atau 75,48%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp3.548.226.477,80 maka terjadi penurunan sebesar Rp(536.634.727,80) atau (15,12)%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang ditetapkan telah tercapai.

Tabel 2.5 Realisasi Kegiatan pada Prog/Keg Peningkatan Kapasitas

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.989.725.000	12 Bulan	3.011.591.750	100	75,48
<b>Pengukuran Kinerja Program</b>	<b>92 %</b>	<b>3.989.725.000</b>	<b>84,1 %</b>	<b>3.011.591.750</b>	<b>91,42</b>	<b>75,48</b>

Sumber : a. Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA  
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pada program ini terdapat kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, didalam kegiatan ini sebagian besar untuk pendanaan atau pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Pada kegiatan

ini bersifat antisipatif/ undangan apabila ada undangan kegiatan akan dilaksanakan dan tidak dapat diprediksi secara pasti serta sebagian besar keputusan pelaksanaan kegiatan ini adalah kewenangan kepala dinas.

### 2.1.6 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Pada program ini terdapat kegiatan 2 (dua) kegiatan yaitu ; Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, didalam kegiatan ini merupakan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Perencanaan Program (Rengram).

Tabel 2.6 Realisasi Kegiatan Rengram

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	9 Dokumen	181.050.000	9 Dokumen	134.589.000	100	74,34
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	98.287.500	4 Laporan	67.433.500	100	68,61
<b>Pengukuran Kinerja Program</b>	<b>51 Nilai AKIP</b>	<b>279.337.500</b>	<b>50,8 Nilai AKIP</b>	<b>202.022.500</b>	<b>99,65</b>	<b>72,32</b>

Sumber : a. Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA  
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pada tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa didalam kegiatan Sub. Bagian Perencanaan Program (Rengram) tersebut sebagian besar sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) berasal dari pembiayaan/ belanja penggandaan, fotocopy dan penjiwaan. Serta melihat hasil kinerja dapat dilihat nilai AKIP tidak mencapai target dimana tahun 2020 mendapat nilai 50,8 Nilai AKIP sehingga capaian 99,65%.

### 2.1.7 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan

Program merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.390.075.000,00 pada Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp334.935.000,00 atau 24,09%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp189.448.200,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp145.486.800,00 atau 76,80%. Realisasi masih belum mencapai target karena banyak kegiatan yang pelaksanaannya terkendala pandemi Covid-19.

Tabel 2.7 Realisasi Kegiatan Bidang LP2N

Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	1100 Izin/ Non Izin	608.725.000	554 Izin/ Non Izin	148.272.500	50,36	24,36
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	1500 Izin/ Non Izin	88.850.000	685 Izin/ Non Izin	4.062.500	45,67	4,57
prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	200 NIB	187.300.000	200 NIB	131.500.000	100,00	70,21
Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/ Kota	4 PTSP	505.200.000	4 PTSP	51.100.000	100	10,11
<b>Pengukuran Kinerja Program</b>	<b>13 Hari</b>	<b>1.390.075.000</b>	<b>12 Hari</b>	<b>334.935.000</b>	<b>100,00</b>	<b>24,09</b>

Sumber : a. Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA  
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pada tabel 2.7 diatas dapat terlihat bahwa realisasi fisik pada program ini belum tercapai, namun upaya untuk mempermudah perizinan merupakan komitmen pimpinan, berikut ringkasan yang menyebabkan anggaran menjadi silpa sbb :

*1. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Sektor Primer*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp608.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp148.272.500,00 atau 24,36%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp99.100.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp49.172.500,00 atau 49,62% dari tahun lalu. Realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal akibat pandemi Covid-19, seperti kegiatan rapat koordinasi yang jumlah pesertanya dibatasi karena protokol kesehatan dan rapat-rapat tim teknis yang seyogyanya dilaksanakan dihotel hanya dapat dilaksanakan secara virtual.

*2. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan Sektor Sekunder dan Tersier*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp88.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.062.500,00 atau 4,57%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp30.350.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp(26.287.500,00) atau (86,61)% dari tahun lalu. Realisasi masih jauh dari target yang ditetapkan karena hampir semua kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena dampak dari pandemi Covid-

19. Rapat peningkatan pengelola tim teknis yang seharusnya dilaksanakan dihotel dialihkan dikantor dengan jumlah peserta yang terbatas. Sementara kegiatan jasa konsultan yang dirasionalisasi pada triwulan II dan dikembalikan melalui APBD-P diakhir bulan Oktober tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

3. *Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp187.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp131.500.000,00 atau 70,21%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp31.940.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp99.560.000,00 atau 311,71% dari tahun lalu. Terdapat sisa anggaran dari sisa-sisa pelaksanaan kegiatan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran, namun target yang ditetapkan telah tercapai.

4. *Kegiatan Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp505.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp51.100.000,00 atau 10,11%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp28.058.200,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp23.041.800,00 atau 82,12% dari tahun lalu. Realisasi anggaran masih jauh dari target yang diharapkan. Serapan untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan tidak maksimal. Begitupun belanja jasa pihak ketiga dalam rangka Forum Komunikasi PTSP Kab/Kota Se-Kaltim dan pelatihan peningkatan kualitas aparatur PTSP

Kab/Kota Se-Kaltim yang anggarannya baru dikembalikan di APBD-P pada bulan Oktober setelah sebelumnya terdampak rasionalisasi anggaran tidak dapat dilaksanakan karena sisa waktu pelaksanaan yang terlalu singkat sedangkan pelaksanaan membutuhkan waktu yang cukup banyak.

### 2.1.8 Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi

Program ini juga merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu, kegiatan pemantauan dan evaluasi; kegiatan pembinaan dan pengawasan; serta kegiatan pengolahan data. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan ISO, pemantauan lapangan/ perusahaan, pengisian LKPM manual/ *Online*, *Press Realease* Data Investasi yang dilakukan per triwulan dan membuat buku mengenai data investasi.

Tabel 2.8 Realisasi Kegiatan Bidang DALAK

Program Pengendalian dan Pelaksanaan Investasi						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	5 LKPM	83.600.000	5 LKPM	0	100	0,00
Penyusunan informasi penanaman modal	5 Dokumen	226.000.000	4 Dokumen	98.439.000	80	43,56
Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	5 Perusahaan	395.400.000	5 Perusahaan	190.500.000	100	48,18
<b>Pengukuran Kinerja Program</b>	<b>7 Perusahaan</b>	<b>705.000.000</b>	<b>7 Perusahaan</b>	<b>288.939.000</b>	<b>100</b>	<b>40,98</b>

Sumber : a. Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA  
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pada tabel 2.8 diatas terutama pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal adalah merupakan kegiatan prioritas yang termasuk dalam

agenda tematik RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, realisasi fisiknya mencapai target yang sudah ditentukan yaitu 100%. Yang dimana kegiatan ini terfokus kepada perusahaan industri kariangau yang ada di Kota Balikpapan sebagaimana menjadi lokus dan fokus pada kegiatan tersebut. Berikut ringkasan realisasi anggaran yang telah tercapai :

1. *Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penanaman Modal*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp83.600.000,00 dan tidak terealisasi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp58.819.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp(58.819.000,00) atau (100)%. Anggaran tahun 2020 tidak terealisasi karena seluruh anggaran dirasionalisasi pada triwulan II saat kegiatan tersebut harusnya dilaksanakan, dan baru dikembalikan melalui APBD-P diakhir bulan Oktober 2020 sehingga waktu pelaksanaan kegiatan sudah tidak memungkinkan.

2. *Kegiatan Penyusunan Informasi Penanaman Modal*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp226.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp98.439.000,00 atau 43,56%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp65.800.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp32.639.000,00 atau 49,60%. Realisasi anggaran masih rendah karena dampak Covid-19 dan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

### 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp395.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp190.500.000,00 atau 48,18%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp353.600.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp(163.100.000,00) atau (46,13)% dari tahun lalu. Karena sebagian anggaran dirasionalisasi pada triwulan II dan baru dikembalikan pada saat APBD-P dibulan Oktober maka hanya sebagian kegiatan saja yang dapat dilaksanakan. Selebihnya tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

#### 2.1.9 Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan penyusunan perencanaan dan kebijakan penanaman modal ; dan penyusunan kajian pengembangan potensi daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan kajian kebijakan seperti membuat atau revisi Perda/Pergub dan membuat kajian potensi unggulan daerah.

Tabel 2.9 Realisasi Kegiatan Bidang P2IPM

Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	2 Dokumen	820.250.000	2 Dokumen	753.790.000	100	91,90
Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	3 Dokumen	759.250.000	3 Dokumen	695.825.000	100	91,65
<b>Pengukuran Kinerja Program</b>	<b>2 Kebijakan</b>	<b>1.579.500.000</b>	<b>2 Kebijakan</b>	<b>1.449.615.000</b>	<b>100</b>	<b>91,78</b>

Sumber : a. Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA  
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pada tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa pada program dan kegiatan ini secara serapan keuangan terserap dengan baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.579.500.000,00 pada Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.449.615.000,00 atau 91,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp531.570.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 918.045.000,00 atau 172,70%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020. Berikut kegiatan yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

1. *Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp820.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp753.790.000,00 atau 91,90%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp386.040.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp367.750.000,00 atau 95,26% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran dibeberapa kegiatan, namun target yang ditetapkan telah tercapai.

2. *Kegiatan Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp759.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp695.825.000,00 atau 91,65%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp145.530.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp550.295.000,00 atau 378,13% dari

tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

### 2.1.10 Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan pelayanan informasi perizinan ; dan pelayanan advokasi perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp776.775.000,00 pada Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp399.780.000,00 atau 51,47%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp95.597.500,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp304.182.500,00 atau 318,19%. Realisasi anggaran masih rendah karena dampak adanya rasionalisasi anggaran pada triwulan II sehingga beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya hingga terbitnya APBD-P diakhir bulan Oktober.

Tabel 2.10 Realisasi Kegiatan Bidang YANDU

Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Pelayanan Informasi Perizinan	1 Aplikasi	503.090.000	0 Aplikasi	261.910.000	0	52,06
Pelayanan Advokasi Perizinan	15 Kasus	273.685.000	12 Kasus	137.870.000	80,00	50,38
<b>Pengukuran Kinerja Program</b>	<b>100 %</b>	<b>776.775.000</b>	<b>86,70 %</b>	<b>399.780.000</b>	<b>86,70</b>	<b>51,47</b>

Sumber : a. Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA  
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pada tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa realisasi belum semua terserap dengan baik. Berikut ringkasan penjelasan realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

### 1. *Kegiatan Pelayanan Informasi Perizinan*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp503.090.000,00 dan terealisasi sebesar Rp261.910.000,00 atau 52,06%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp45.100.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp216.810.000,00 atau 480,73% dari tahun lalu. Realisasi anggaran masih rendah karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan waktu.

### 2. *Kegiatan Pelayanan Advokasi Perizinan*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp273.685.000,00 dan terealisasi sebesar Rp137.870.000,00 atau 50,38%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp50.497.500,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp87.372.500,00 atau 173,02%. Realisasi anggaran tidak mencapai target yang diharapkan karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan waktu karena sempat dirasionalisasi pada triwulan II.

#### **2.1.11 Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha**

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal ; dan peningkatan kerjasama penanaman modal. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan event-event pameran guna mempromosikan potensi dan peluang untuk berinvestasi, dan pelaksanaan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU). Rendahnya realisasi anggaran karena dampak pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat akibat adanya kebijakan untuk melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala

Besar) dan himbauan *physical distancing* lainnya sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2.11 Realisasi Kegiatan Bidang P2M

Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha						
Kegiatan	Target		Realisasi		%	
	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu (Rp)	Fisik	Keu
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	9 Event	1.630.000.000	5 Event	712.161.800	55,56	43,69
Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	2 Pertemuan Bisnis	266.000.000	0 Pertemuan Bisnis	0	0,00	0,00
<b>Pengukuran Kinerja Program</b>	<b>2 MoU</b>	<b>1.896.000.000</b>	<b>0 MoU</b>	<b>712.161.800</b>	<b>0,00</b>	<b>37,56</b>

Sumber : a. Laporan Kartu Kendali Kegiatan SIMDA  
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Pada tabel 2.11 dapat dijelaskan bahwa realisasi fisik maupun keuangan belum terserap cukup baik, hal ini disebabkan pada Kegiatan Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal tidak dapat direalisasikan dan event pameran tidak terlaksana karena pandemi dan PSSB di daerah yang akan dilaksanakan kegiatan pameran. Adapun kegiatan yang terlaksana pada penyelenggaraan promosi penanaman modal tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

1. *Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.630.000,00 dan terealisasi sebesar Rp712.161.800,00 atau 43,69%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp113.668.425,00 atau 18,99%. Realisasi anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan akibat pandemi Covid-19 yang menyebar hampir di seluruh dunia sehingga event-event pameran maupun exhibition yang

dilaksanakan diluar dan didalam negeri mengalami hambatan. Beberapa event organizer membatalkan penyelenggaraan pameran yang telah terjadwal karena adanya kebijakan pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus Covid-19.

## 2. *Kegiatan Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal*

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp266.000.000,00 dan tidak terealisasi seperti tahun sebelumnya. Anggaran tahun 2020 tidak terealisasi karena melihat perkembangan wabah Covid-19 maka kegiatan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan Mou kerjasama antar pemerintah provinsi maupun pertemuan yang memfasilitasi *stakeholder* dan pelaku usaha tidak dapat dilaksanakan.

### **2.1.12 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Secara keseluruhan pencapaian target masih belum memuaskan karena dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Merebaknya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang cukup ketat di awal-awal merebaknya wabah Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda atau bahkan dibatalkan pelaksanaannya.
2. Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan

kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan

3. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

## **2.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sesuai Dokumen RPJMD Kalimantan Timur DPMPTSP Prov. Kaltim memiliki dua Program Prioritas **Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan dan Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi**, perumusan program prioritas disepakati pada saat asistensi rencana kegiatan, dengan merujuk pada dokumen RPJMD 2019 s/d 2023. Pada tahun 2019-2023 sebagai masa jabatan kepala daerah terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap RENSTRA Perangkat Daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Lihat Tabel 2.12 Rekapitulasi Evaluasi Renja PD.

Tabel 2.12 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020

Perangkat Daerah : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023	Target Kinerja (Tahun 2020) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	75 %	72 %	86,70	120,42	72	96,00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	60 bulan	12 bulan	12	100,00	24	40,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	30 unit	6 unit	6	100,00	12	40,00
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana di lingkungan DPMPTSP Prov. Kaltim	43 paket	14 paket	14	100,00	28	65,12
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	40 bulan	12 bulan	12	100,00	24	60,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	95 %	92 %	84,11	91,42	92	96,84
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	60 bulan	12 bulan	12	100,00	24	40,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	75 Nilai AKIP	61 Nilai AKIP	50,82	83,31	51	67,76
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Kinerja, dan Anggaran	45 Dokumen	9 Dokumen	9	100,00	18	40,00
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	20 Laporan	4 Laporan	4	100,00	8	40,00

Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	10 Hari	13 Hari	12	92,31	12	120,00
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	Jumlah izin investasi sektor primer yang diterbitkan	5.600 Izin/ Non Izin	1.100 Izin/ Non Izin	554	50,36	1.294	23,11
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	7.775 Izin/ Non Izin	1.500 Izin/ Non Izin	685	45,67	2.196	28,24
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan	39.500 NIB	200 NIB	200	100,00	15.348	38,86
Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh kualifikasi bintang dari BKPM RI	20 PTSP	4 PTSP	4	100,00	8	40,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	53 perusahaan industri baru	7 perusahaan industri baru	7	100,00	43	81,13
Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	30 LKPM	5 LKPM	5	100,00	9	30,00
Penyusunan informasi penanaman modal	Jumlah dokumen realisasi investasi Kalimantan Timur	25 Dokumen	5 Dokumen	4	80,00	9	36,00
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi	30 Perusahaan	5 Perusahaan	5	100,00	9	30,00
Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	9 Kebijakan	2 Kebijakan	2	100,00	3	33,33
Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Pergub tentang Penanaman Modal yang disusun	10 dokumen	2 dokumen	2	100,00	3	30,00
Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah kajian potensi unggulan daerah	13 Dokumen	3 Dokumen	3	100,00	4	30,77

Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Tingkat kepuasan layanan advokasi dan informasi perizinan	100 %	100 %	86,70	86,70	86,70	86,70
Pelayanan informasi perizinan	Jumlah layanan aplikasi perizinan yang dihasilkan	5 Aplikasi	1 Aplikasi	0	0,00	1	20,00
Pelayanan Advokasi Perizinan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	125 kasus	15 kasus	12	80,00	45	36,00
Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjanjian kerjasama penanaman modal	16 MoU	3 MoU	0	0,00	0	0,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah event promosi	46 Event	9 Event	5	55,56	12	26,09
Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah pertemuan bisnis	26 Pertemuan Bisnis	5 Pertemuan Bisnis	0	0,00	0	0,00

-  = Program Pendukung Operasional
-  = Program Prioritas
-  = Program Pendukung Prioritas

### **2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2016, tugas pokok DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah ***“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”*** dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang perizinan dan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang perizinan dan penanaman modal;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan penanaman modal;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
6. Peyelenggaraan urusan kesekretariatan;
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja adalah salah satu alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Capaian kinerja merupakan rambu atau tanda apakah sasaran kegiatan

yang dilakukan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik dapat menghasilkan informasi kinerja yang member indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya, bila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja, maka dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja pada dasarnya tidak hanya digunakan saat penyusunan laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja dapat juga merupakan komponen yang krusial sejak merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Adanya indikator kinerja menuntut perencanaan harus sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja bertujuan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang lebih sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

#### **2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menjalankan misi Lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Isu-isu ini menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan skala prioritas selama lima (5) tahun kedepan.

Isu tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama. Terdapat empat belas (14) perubahan yang saat ini harus diperhatikan, yaitu ;

1. Liberalisasi perdagangan;
2. Pencapaian Milenium Development Goal's (MDG's);
3. Kenaikan harga produk pangan dan kelangkaan sumber energi;
4. Arus demokratisasi yang tidak bisa dibendung;
5. Terbukanya pasar bebas tenaga kerja (AFTA) Tahun 2015;
6. Pembatasan produksi sector primer (minyak, gas dan batu bara);
7. Pengembangan industry bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
8. Pembangunan dan pengembangan produktivitas sector pertanian dalam arti luas;
9. Pengembangan industri turunan minyak, gas dan batu bara;
10. Pengembangan industri pertanian dalam arti luas;
11. Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT);
12. Pengembangan sektor jasa, perdagangan dan keuangan;
13. Pengembangan industri pariwisata; dan
14. Pengembangan infrastruktur pendukung industri.

Berdasarkan isu-isu diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur perlu memberi perhatian pada isu yang berhubungan dengan peningkatan Iklim Investasi didaerah, karena sangat menentukan besar kecilnya modal yang diinvestasikan. Iklim Investasi merupakan perpaduan antara sumberdaya alam yang tersedia dan kreatifas

dalam merencanakan dan mengorganisasikan antar kementerian dan lembaga terkait. Semangat otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada setiap provinsi dan kabupaten/ kota untuk lebih efektif dalam menarik investasi melalui strategi kemudahan dan insentif. Keadaan tersebut menimbulkan Iklim Persaingan yang kompetitif dan perlu didukung oleh kebijakan nasional dengan tidak membatasi atau mempersulit Iklim Investasi di Daerah.

Iklim usaha yang kondusif akan menaikkan realisasi investasi yang memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Perkembangan dunia usaha dan tren investasi global sangat mempengaruhi perluasan dan pertumbuhan sektor industri. Bidang agroindustri dan energi terbarukan diharapkan menjadi tulang punggung menuju visi Kaltim 2025. Setiap kebijakan diharapkan dapat mengurangi hambatan penanaman modal serta dapat menjadi stimulasi investasi.

## **2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal (Ranwal) RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2022 Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Rancangan Awal RKPD	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Hasil Analisis Kebutuhan (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
<b>Total Rancangan Awal</b>				<b>29.259.377.470</b>	<b>Total Rancangan Awal</b>				<b>29.417.141.000</b>
<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)</b>	<b>85 %</b>	<b>20.999.377.470</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		<b>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)</b>	<b>85 %</b>	<b>19.132.226.000</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	2.000.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	1.279.464.550
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	7 Dokumen	1.000.000.000	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran</i>	7 Dokumen	700.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	1.000.000.000	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	7 Laporan	579.464.550
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	12.924.577.470	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	12.734.116.754
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah laporan daftar gaji dan tunjangan	12 Laporan	12.259.377.470	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan daftar gaji dan tunjangan</i>	12 Laporan	9.572.618.994
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah orang yang melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi	100 Orang	403.080.000	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Samarinda	<i>Jumlah orang yang melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi</i>	62 Orang	2.899.377.760
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	1000 Laporan	262.120.000	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Samarinda	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi</i>	1000 Laporan	262.120.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	2 Orang	61.800.000	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		<i>Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah</i>	2 Orang	61.800.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah laporan kartu inventaris ruangan (KIR) yang disusun	17 Laporan	61.800.000	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan kartu inventaris ruangan (KIR) yang disusun</i>	17 Laporan	61.800.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	205.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Pegawai	209.910.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	120 Stel	120.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	120 Stel	124.910.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	Orang	85.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	85.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	1.379.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana	12 Bulan	1.028.706.855
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	9 Jenis	32.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	9 Jenis	24.714.144
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	8 Jenis	510.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	8 Jenis	261.823.544
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah bulan pelaksanaan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah bulan pelaksanaan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	5.975.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	96 Bahan Bacaan	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	96 Bahan Bacaan	19.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	109 Kegiatan	712.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	109 Kegiatan	712.200.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah ruangan yang difasilitasi media berbasis elektronik untuk rapat-rapat online	5 Ruangan	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah ruangan yang difasilitasi media berbasis elektronik untuk rapat-rapat online	5 Ruangan	4.794.167
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	76 Unit/Tahun	2.150.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	98 Unit/Tahun	1.523.635.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan mobil jabatan yang diadakan	4 Unit	1.246.290.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan mobil jabatan yang diadakan	0 Unit	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan	15 Unit	476.510.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan	5 Unit	822.640.000

Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah unit mebel yang diadakan	36 Unit	90.000.000	<i>Pengadaan Mebel</i>	Samarinda	<i>Jumlah unit mebel yang diadakan</i>	25 Unit	69.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	38 Unit	338.000.000	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Samarinda	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan</i>	68 Unit	631.995.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	810.000.000	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana</i>	12 Bulan	971.591.041
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12 Bulan	400.000.000	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Samarinda	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan</i>	12 Bulan	515.500.041
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	55.000.000	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Samarinda	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	12 Bulan	96.049.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah bulan administrasi perkantoran yang terlayani	12 Bulan	355.000.000	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Samarinda	<i>Jumlah bulan administrasi perkantoran yang terlayani</i>	12 Bulan	360.042.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	6 Kegiatan	1.468.000.000	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara</i>	4 Kegiatan	1.323.001.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas	15 Unit	298.000.000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Samarinda	<i>Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas</i>	15 Unit	298.775.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terawat	8 Jenis	180.000.000	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Samarinda	<i>Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terawat</i>	8 Jenis	219.936.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang terlaksana	1 Kegiatan	900.000.000	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Samarinda	<i>Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang terlaksana</i>	5 Kegiatan	676.290.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang terlaksana	2 Kegiatan	90.000.000	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Samarinda	<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang terlaksana</i>	2 Kegiatan	128.000.000
<b>PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>1.880.000.000</b>	<b>PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>1.880.000.000</b>
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	2 Dokumen	1.880.000.000	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</i>		<i>Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi</i>	2 Kegiatan	1.880.000.000

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	1.000.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	1.000.000.000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Samarinda	Jumlah dokumen kajian peta potensi investasi	1 Dokumen	880.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Samarinda	Jumlah dokumen kajian peta potensi investasi	1 Dokumen	880.000.000
<b>PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>2.607.820.000</b>
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	10 Kegiatan	1.700.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	12 Kegiatan	2.607.820.000
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah pertemuan promosi penanaman modal	3 Pertemuan	350.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah pertemuan promosi penanaman modal	5 Pertemuan	1.133.920.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi	7 Pameran	1.350.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Samarinda	Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi	7 Pameran	1.473.900.000
<b>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Waktu Penyelesaian Proses Perizinan</b>	<b>12 Hari</b>	<b>1.830.000.000</b>	<b>PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Waktu Penyelesaian Proses Perizinan</b>	<b>11 Hari</b>	<b>3.651.330.000</b>
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1400 Izin/ Non Izin	1.830.000.000	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penyelesaian penerbitan izin/ non izin	1400 Izin/ Non Izin	3.651.330.000
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelatihan pelayanan yang prima	2 Kegiatan	400.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelatihan pelayanan yang prima	2 Kegiatan	400.000.000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	7000 NIB	300.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	7000 NIB	2.300.000.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Samarinda	Jumlah persentase pengaduan yang diselesaikan	100 Persen	630.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Samarinda	Jumlah persentase pengaduan yang diselesaikan	100 Persen	451.330.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Samarinda	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Kewenangan Provinsi	10 Laporan	500.000.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	Samarinda	<i>Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Kewenangan Provinsi</i>	<i>10 Laporan</i>	<i>500.000.000</i>
<b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.500.000.000</b>
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7 Perusahaan	2.250.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7 Perusahaan	1.500.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	7 LKPM	700.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	7 LKPM	500.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah perusahaan yang dibina	7 Perusahaan	450.000.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Samarinda	Jumlah perusahaan yang dibina	7 Perusahaan	500.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Samarinda	Jumlah perusahaan yang diawasi	7 Perusahaan	1.100.000.000	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	Samarinda	Jumlah perusahaan yang diawasi	7 Perusahaan	500.000.000
<b>PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>600.000.000</b>	<b>PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>645.765.000</b>
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media elektronik yang tersedia	3 Media	600.000.000	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		Jumlah Media elektronik yang tersedia	3 Media	645.765.000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah data yang diolah/ disajikan	4 Laporan	600.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Samarinda	Jumlah data yang diolah/ disajikan	2 Aplikasi	645.765.000

Pada tabel 2.13 diatas merupakan rencana kerja tahun (n+1) yang dimaksud adalah rencana tahun anggaran 2021, merupakan perubahan dari Permendagri No. 13 tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 tahun 2019. Yang sekarang telah diketahui banyaknya perubahan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2021 dan terindikasi satu bidang khususnya Bidang Pelayanan Pengaduan (YANDU) akan mengalami perubahan nomenklatur apabila mengacu pada Permendagri No. 90 tahun 2019, serta perubahan yang sangat mendasar adalah Perangkat Daerah sangat dimungkinkan untuk me-review kembali Renstra 2019-2023 Perangkat Daerah.

## **2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kab/ Kota**

Rancangan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah (PD) Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan pada 07 April Tahun 2021 yang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan perizinan DPMPTSP Provinsi Kaltim dengan melakukan diklat kepada petugas di Kab/Kota dalam penggunaan aplikasi OSS RBA, terutama dalam memberikan layanan berbantuan kepada masyarakat pemohon.
2. Penyesuaian Program/Kegiatan sesuai Kepmen 050/2019 dan Penyusunan Renstra Kabupaten/Kota sehingga cascading antara Program/Kegiatan Prioritas Provinsi dengan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota sehingga terjadinya keselarasan kegiatan antara Pemerintahan Provinsi dan Kab/Kota.

3. Mendorong dan mendukung pengembangan IKN dan Buluminung dan hal menarik calon investor dan pada saat ini sedang disusun master plan IKN oleh Bappenas, agar apa yang telah disusun tetap dapat bersinergi dengan apa yang direncanakan oleh Kabupaten PPU terutama Kawasan Peruntukan Industri Buluminung.
4. Membuat sebuah regulasi yang meninjau kembali Percepatan Kemudahan Berusaha yang bersinergi antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
5. Mendukung antara Pemerintahan Provinsi, Kab/ Kota dengan Pemerintahan Pusat untuk mengawal Investor yang tertarik terutama ketika IKN sudah ditetapkan di Kalimantan Timur.
6. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kab/ Kota dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi di daerah.
7. Melakukan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUMPD) yang bersinergi dengan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur.
8. Meningkatkan sinergitas antara Pemerintahan Pusat dan Provinsi untuk mendukung Infrastruktur pada Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPIK).
9. Mendukung kegiatan DPMPTSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur dalam hal pemberian informasi tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik kepada Kab/Kota.

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3.1 Tela'ahan Kebijakan Nasional

Sejalan tujuan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, dimana arah tujuan tersebut adalah “*Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya*” yang memiliki permasalahan pokok sebagai berikut penjelasannya (lihat tabel 3.1) :

Tabel 3.1 Matriks RPJPD Prov. Kaltim

TUJUAN RPJPD	SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan	Daya saing investasi industri belum optimal	Regulasi terutama terkait perijinan yang belum efektif	Ketersediaan dan validasi terhadap data statistik dan spasial yang kurang mendukung Perubahan kebijakan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota

 = Tujuan Utama RPJPD

Dengan permasalahan pada tabel 3.1 diatas maka strategi yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Mendorong berkembangnya Penanaman Modal diberbagai sektor yang mencakup Sektor Primer, Sekunder dan Tersier dalam rangka meningkatkan persebaran.
2. Mendorong berkembangnya Penanaman Modal berbasis keunggulan daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja.

3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik di Pusat maupun di daerah.
4. Mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha dalam rangka meningkatkan daya tarik penanaman modal.
5. Membangun sistem informasi secara elektronik untuk mempercepat pendaftaran izin dan prosesnya.
6. Membangun dan mengembangkan sistem informasi berkenaan data rencana dan realisasi investasi serta memublikasikannya ke instansi pemerintah/ swasta dan masyarakat luas.
7. Mengevaluasi dan merevisi SOP dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan.
8. Membuat dan merevisi berkenaan peraturan-peraturan kebijakan tentang percepatan dan kemudahan untuk berinvestasi.
9. Memberikan informasi kepada investor atau mitra kerjasama mengenai potensi dan peluang untuk berinvestasi.

Sejalan dengan kebijakan Nasional tersebut diatas, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2016, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah ***“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”***.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan goal yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan terukur melalui indikator dan standar yang sudah ditetapkan, maka terdapat beberapa penjelasan mengenai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah :

### **3.2.1 Tujuan**

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/0214/B.P3D-Bapp/2021 Tentang Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 maka Rancangan Awal Rencana Strategis dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi dan tujuan Gubernur serta wakil gubernur provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 sebagai adalah **“Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara”**. Untuk mencapainya tujuan tersebut maka dibuatlah rumusan strategi yaitu Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non Migas dan Non Batubara, yang menjadikan DPMPTSP memiliki program prioritas.

### **3.2.2 Sasaran Program Kegiatan**

Sasaran program kegiatan DPMPTSP yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan visi dan misi Gubernur terpilih periode 2019-2023 Bapak Isran Noor dan Bapak Hadi Mulyadi terdiri dari enam sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Aparatur Sipil Negara dan sarana prasarana penunjang ;

2. Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Lebih Mudah dan Cepat ;
3. Terwujudnya Peningkatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
4. Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Implementatif di Kawasan Strategis ;
5. Terselenggaranya Penyusunan Strategi Promosi dan Kegiatan Promosi Penanaman Modal ;
6. Terinformasikannya Pengurusan Pelayanan Perizinan secara Elektronik.

Sedangkan sasaran strategis merupakan bagian integral dalam suatu proses perencanaan strategis yang terfokus pada kegiatan tertentu serta adanya keterkaitan dengan dokumen RPJMD yang telah disepakati pada waktu forum-forum perencanaan kegiatan. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah lihat Tabel 3.2 :

Tabel 3.2 Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)

No	Tujuan (Gubernur)	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2022
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	Triliun (Rp)	35
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85

*Sumber data RENSTRA DPMPTSP Prov. Kaltim 2019-2023*

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mencakup 6 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan yaitu :

### **3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

#### **I. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan dan anggaran yang terdapat beberapa rencana pendanaan sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :
  - *Penyusunan Reviu Renstra 2019-2023*
  - *Kegiatan Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab / Kota Se Kaltim*
  - *Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA).*
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :
  - *Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).*
  - *Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan LPPD, IKI, IKU, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Rencana Aksi dan LKjIP/LAKIP).*

#### **II. Administrasi Keuangan**

Pada kegiatan ini merupakan rencana pendanaan untuk administrasi keuangan dan belanja gaji PNS dan Non PNS serta pendukung kegiatan pada bagian keuangan. Sub kegiatan terdiri dari :

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;

4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ;
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan kartu inventaris ruangan (KIR).

6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN yang terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ;
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

V. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan belanja mengikat pada perangkat daerah, karena pada kegiatan ini merupakan belanja rutinitas. Berikut sub kegiatan yang terdiri dari :

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;

14. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana dan prasarana dalam bentuk barang guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan :

15. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;

16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;

17. Pengadaan Mebel ;

18. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini merupakan penyediaan prasarana dalam bentuk jasa guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan :

19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;

20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini merupakan pemeliharaan dalam bentuk barang dan jasa guna meningkatkan performa dan kinerja aparatur ASN dilingkup DPMPTSP Prov. Kaltim. Berikut beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan :

22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

### **3.3.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

#### **IX. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**

Sub kegiatan terdiri dari :

26. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
  - *Penyusunan dan Review RUPMP.*
  - *Buletin Investasi.*
  - *Kajian Direktori Investasi.*
  - *Kajian Peluang Kemitraan Investor dan UMKM.*
  - *Kajian Peluang Pasar Investasi Dan Calon Investor Potensial.*

- *Rapat Evaluasi Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah.*

27. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Kajian Manufaktur Pengalengan Ikan dan Pengelolaan Pakan Ternak.*
- *Pelatihan Potensi Investasi Regional (PIR).*

### **3.3.3 Program Promosi Penanaman Modal**

X. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Sub kegiatan terdiri dari :

28. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Kegiatan Matchmaking Dunia Usaha (2 Kali Kegiatan).*
- *Belanja Peralatan Pendukung Dokumentasi.*

29. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Pelaksanaan Event Pameran Dalam Daerah (2 Kali Event).*
- *Pelaksanaan Event Pameran Luar Daerah (6 Kali Event).*

### 3.3.4 Program Pelayanan Penanaman Modal

XI. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

30. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Dalam Manajemen Perizinan Investasi Se-Kab/Kota.*

- *Bimbingan Teknis Service Excellence Tahun 2022.*

31. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Kegiatan sosialisasi dan Pelatihan OSS.*

- *Koordinasi dan sinkronisasi data antar Kab dan Kota Kalimantan Timur.*

32. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan se OPD teknis terkait Kab/Kota se Kalimantan Timur.*

- *Kegiatan Forum Komunikasi Penanganan Pengaduan se OPD teknis terkait Provinsi Kalimantan Timur.*
  - *Pembentukan Tim penanganan pengaduan Litigasi dan Non Litigasi*
33. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
- *Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan se Kaltim.*
  - *Rapat Tim Teknis Proses Perizinan dan Non Perizinan*
  - *Koordinasi, Pemantauan, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan proses perizinan dan non perizinan.*

### **3.3.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

XII. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Pada kegiatan tersebut memiliki tiga sub kegiatan yang terdiri dari :

34. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
- *Kegiatan Sosialisasi LKPM Online dan Penerapannya (2 Kali Kegiatan).*
  - *Menghadiri/Mengikuti Rapat, Workshop, Sosialisasi, Koordinasi dan Konsolidasi.*

- *Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Kalimantan Timur.*
  - *Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Luar Kalimantan Timur.*
35. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
- *Kegiatan Sosialisasi Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (3 Kali Kegiatan)*
  - *Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Kalimantan Timur.*
  - *Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Perusahaan PMA/PMDN di Luar Kalimantan Timur.*
36. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;
- *Pembentukan Tim Pemecah Masalah dan Percepatan Realisasi Investasi di KPIK.*
  - *Kegiatan Pengawasan ke Perusahaan di Wilayah KPIK dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.*
  - *Kegiatan Pengawasan ke Perusahaan yang berlatas atau berkantor di luar daerah Provinsi Kalimantan Timur.*
  - *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal.*

### 3.3.6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

XIII. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan ini terindikasi menjadi bidang baru, pada kegiatan ini hanya terdapat satu sub kegiatan yaitu :

37. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut ;

- *Kegiatan FGD Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur.*
- *Pembentukan Tim Pengelola Website DPMPTSP Prov Kalimantan Timur.*
- *Pembentukan Tim PPID Pembantu.*
- *Pengembangan Sistem Layanan Perizinan dan Nonperizinan.*

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Perumusan Kegiatan Prioritas

Di dalam pembahasan forum Finalisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah disepakati bahwa untuk rencana kerja tahun 2022 rencana program prioritas terdiri dari 2 (dua) program yaitu **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dan **Program Pelayanan Penanaman Modal**. Pada program tersebut bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi sektor non migas dan non batubara serta pelaksanaan untuk membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri/perusahaan yang bernilai meningkatkan investasi di Kalimantan Timur, diseluruh Kalimantan Timur terutama dikawasan Kariangau dan Balikpapan sekitarnya. Berikut penyajian data berupa tabel dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2022

Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	11 Hari	3.651.330.000,00
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	1.500.000.000,00

#### 4.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Rumusan rencana pendanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 yang sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur serta telah dianalisa ada beberapa program yang

berubah Pada program kemudahan layanan dan percepatan proses perizinan yang semula targetnya adalah “izin/ non izin” menjadi “hari” penyesuaian dan kesepakatan ini diambil pada saat Musrenbang pada tanggal 16 dan 17 Januari 2019 silam. Dan terdapat hampir secara keseluruhan perubahan redaksi atau nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dikarenakan penyesuaian dan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Maka dalam hal ini DPMPTSP Prov. Kaltim telah melakukan pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setelah dianalisa terdapat satu bidang yang berubah secara keseluruhan tugas pokok dan fungsinya, yaitu yang sebelumnya Bidang Pelayanan Pengaduan Advokasi (YANDU) menjadi Bidang Pengolaahan Data, oleh karena itu harus ada perbaikan dalam hal struktur organisasi dan tugas-tugas pokok yang jelas.

Dalam hal lain nilai investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan target khusus yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, dan yang akan disepakati menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) milik DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur serta menjadi perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Daerah (lihat Tabel. 3.2). Maka telah dirumuskan dan disajikan dalam bentuk tabel secara detail dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Program/ kegiatan pendukung prioritas (lihat Tabel 2.12) merupakan upaya untuk mendukung tercapainya sasaran program prioritas serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Kepala daerah pada periode tahun 2019-2023.

Tabel 4.2 Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Tahun 2022

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROG / KEG (BARU)	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF 2022	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>29.417.141.000</b>	<b>34.000.000.000</b>
2	18				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			<b>29.417.141.000</b>	<b>34.000.000.000</b>
2	18	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)</b>	<b>85 %</b>	<b>19.132.226.000</b>	<b>20.750.000.000</b>
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	71 Nilai AKIP	1.279.464.550	2.000.000.000
2	18	01	1.01	01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran</i>	<i>7 Dokumen</i>	700.000.000	1.000.000.000
2	18	01	1.01	07	<i>Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran</i>	<i>7 Laporan</i>	579.464.550	1.000.000.000
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	24 Dokumen	12.734.116.754	13.515.765.754
2	18	01	1.02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah laporan daftar gaji dan tunjangan</i>	<i>12 Laporan</i>	9.572.618.994	10.115.765.754
2	18	01	1.02	02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah orang yang melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi</i>	<i>62 Orang</i>	2.899.377.760	3.000.000.000

2	18	01	1.02	03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi</i>	<i>1000 Laporan</i>	262.120.000	400.000.000
2	18	01	1.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah</i>	<i>2 Orang</i>	61.800.000	61.800.000
2	18	01	1.03	06	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah laporan kartu inventaris ruangan (KIR) yang disusun</i>	<i>17 Laporan</i>	61.800.000	61.800.000
2	18	01	1.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah pegawai yang telah melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan</i>	<i>100 Pegawai</i>	209.910.000	212.070.000
2	18	01	1.05	02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan</i>	<i>120 Stel</i>	124.910.000	127.070.000
2	18	01	1.05	09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal</i>	<i>20 Orang</i>	85.000.000	85.000.000
2	18	01	1.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana</i>	<i>12 Bulan</i>	1.028.706.855	1.028.706.855
2	18	01	1.06	01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang diadakan</i>	<i>9 Jenis</i>	24.714.144	24.714.144
2	18	01	1.06	02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan</i>	<i>8 Jenis</i>	261.823.544	261.823.544
2	18	01	1.06	05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan cetakan dan penggandaan</i>	<i>12 Bulan</i>	5.975.000	5.975.000
2	18	01	1.06	06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan</i>	<i>96 Bahan Bacaan</i>	19.200.000	19.200.000
2	18	01	1.06	09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>109 Kegiatan</i>	712.200.000	712.200.000
2	18	01	1.06	11	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah ruangan yang difasilitasi media berbasis elektronik untuk rapat-rapat online</i>	<i>5 Ruangan</i>	4.794.167	4.794.167

2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	98 Unit/Tahun	1.523.635.000	577.570.000
2	18	01	1.07	01	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah unit kendaraan mobil jabatan yang diadakan</i>	0 Unit	-	-
2	18	01	1.07	02	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan</i>	5 Unit	822.640.000	-
2	18	01	1.07	05	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah unit mebel yang diadakan</i>	25 Unit	69.000.000	49.500.000
2	18	01	1.07	06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan</i>	68 Unit	631.995.000	528.070.000
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	12 Bulan	971.591.041	961.365.591
2	18	01	1.08	02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan</i>	12 Bulan	515.500.041	515.500.041
2	18	01	1.08	03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	12 Bulan	96.049.000	105.843.550
2	18	01	1.08	04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah bulan administrasi perkantoran yang terlayani</i>	12 Bulan	360.042.000	340.022.000
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah yang terpelihara	4 Kegiatan	1.323.001.800	2.392.721.800
2	18	01	1.09	01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas</i>	15 Unit	298.775.800	398.775.800
2	18	01	1.09	06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terawat</i>	8 Jenis	219.936.000	219.936.000
2	18	01	1.09	09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah kegiatan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang terlaksana</i>	5 Kegiatan	676.290.000	1.644.930.000

2	18	01	1.09	10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang terlaksana</i>	2 Kegiatan	128.000.000	129.080.000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>1.880.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi	12 Laporan	1.880.000.000	3.000.000.000
2	18	02	1.02	01	<i>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur</i>	12 Kegiatan	1.000.000.000	1.500.000.000
2	18	02	1.02	02	<i>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi</i>	<i>Jumlah dokumen kajian peta potensi investasi</i>	5 Pertemuan	880.000.000	1.500.000.000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Provinsi</b>	<b>7 Pameran</b>	<b>2.607.820.000</b>	<b>3.500.000.000</b>
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan	11 Hari	2.607.820.000	3.500.000.000
2	18	03	1.01	01	<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah pertemuan promosi penanaman modal</i>	1400 Izin/ Non Izin	1.133.920.000	1.500.000.000
2	18	03	1.01	02	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi</i>	2 Kegiatan	1.473.900.000	2.000.000.000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Waktu Penyelesaian Proses Perizinan</b>	<b>7000 NIB</b>	<b>3.651.330.000</b>	<b>3.500.000.000</b>
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian penerbitan izin/non izin	7 Perusahaan	3.651.330.000	3.500.000.000
2	18	04	1.02	01	<i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah kegiatan pelatihan tentang pelatihan pelayanan yang prima</i>	7 Perusahaan	400.000.000	500.000.000

2	18	04	1.02	02	<i>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan</i>	5 Kegiatan	2.300.000.000	2.000.000.000
2	18	04	1.02	03	<i>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan</i>	<i>Jumlah persentase pengaduan yang diselesaikan</i>	3 Media	451.330.000	500.000.000
2	18	04	1.02	04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	<i>Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Kewenangan Provinsi</i>	2 Aplikasi	500.000.000	500.000.000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>05</b>			<b>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM</b>	<b>100 %</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	7 Perusahaan	1.500.000.000	2.250.000.000
2	18	05	1.01	01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)</i>	7 LKPM	500.000.000	750.000.000
2	18	05	1.01	02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah perusahaan yang dibina</i>	7 Perusahaan	500.000.000	750.000.000
2	18	05	1.01	03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah perusahaan yang diawasi</i>	7 Perusahaan	500.000.000	750.000.000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>06</b>			<b>PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>645.765.000</b>	<b>1.000.000.000</b>
2	18	06	1.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media elektronik yang tersedia	3 Media	645.765.000	1.000.000.000
2	18	06	1.01	01	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah data yang diolah/ disajikan</i>	4 Laporan	645.765.000	1.000.000.000

**BAB V**  
**P E N U T U P**

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disampaikan, untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan.

Selanjutnya kami mengharapkan agar alokasi dana yang sudah kami proyeksikan didalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan Anggaran tahun 2022 ini tidak mengalami perubahan secara signifikan dan berharap dapat ditingkatkan, sehingga apa yang menjadi komitmen kami untuk meningkatkan realisasi investasi secara stabil dan dapat terlaksana.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Ttd.**

**Kepala Dinas PMPTSP**

# LAMPIRAN



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website : <http://dpmptsp.kaltimprov.go.id> email : [dpmptsp.kaltim@gmail.com](mailto:dpmptsp.kaltim@gmail.com),  
[dpmptsp@kaltimprov.go.id](mailto:dpmptsp@kaltimprov.go.id) email PTSP : [iso.ptspbppmd@gmail.com](mailto:iso.ptspbppmd@gmail.com), twitter : @dpmptsp\_kaltim  
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446  
SAMARINDA 75112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Nomor : ~~073~~.1./~~021~~.../DPMPTSP-SEKR/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Memimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun yang terdiri dari bidang-bidang teknis dan sekretariat agar Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang disusun lebih proporsional dan sejalan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- b. Bahwa untuk keperluan Penyusunan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan Tim Penyusun.
- c. Untuk mendukung dan menginventarisir dalam pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kebijakan, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan bagian tugas dari TIM, dan bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusun sebagaimana disebutkan pada huruf (b) diatas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;  
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;  
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;  
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;  
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;  
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;  
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;  
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008;  
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008;  
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada dicantum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas ;
1. Menyusun draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Melakukan Evaluasi capaian kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun berjalan sebagai bahan penetapan kinerja pada tahun berikutnya;
  3. Menyusun data-data Program dan Kegiatan pada tahun berikutnya yang akan dikompilasi sebagai bahan SIPD pada tahun selanjutnya;
- KETIGA : Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Tim memperhatikan arah dan kebijakan Penanaman Modal Nasional, dan Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, yang terintegrasi dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda.  
Pada Tanggal : 11 Januari 2020



Kepala,

**PUGUH HARJANTO, S.STP., M.SI**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197908101998021001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : ~~013.1.021~~/DPMPTSP-SEKR/2021, Tanggal Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;

---

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENJA KERJA (RENJA)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

---

- I. Penanggung Jawab : Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
- II. Ketua : Asbudin, ST., M.Si (Kasubbag Perencanaan Program)  
DPMPTSP Prov. Kaltim
- III. Sekretaris : Arianto Effendi, S.Sos
- Seksi – Seksi :**
1. Seksi Pengumpulan data : 1. Anita Tyas Fachlizha, SE  
2. Ence Deasy Yuniasari, S.S  
3. Febrisma Ramadhiya Findarti, S.AB  
4. Roni Helpani, SP
2. Seksi Pengetikan/Input data : Belin Ruruk, S.Kom
3. Tim Korektor : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal  
2. Kepala Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha  
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan  
4. Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan  
5. Kepala Bidang Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan
- 

Samarinda, 11 Januari 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Timur,

Kepala,



RUGUH HARJANTO, S.STP., M.SI

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197908101998021001





# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website : <http://dpmptsp.kaltimprov.go.id> email : [dpmptsp.kaltim@gmail.com](mailto:dpmptsp.kaltim@gmail.com),  
[dpmptsp@kaltimprov.go.id](mailto:dpmptsp@kaltimprov.go.id) email PTSP : [iso.ptspbppmd@gmail.com](mailto:iso.ptspbppmd@gmail.com) twitter : @dpmptsp\_kaltim  
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446  
SAMARINDA 75112

## BERITA ACARA

### KESEPAKATAN HASIL

#### FORUM PERANGKAT DAERAH PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPTSP PROVINSI, KAB / KOTA SE - KALTIM

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Tujuh* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, telah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab / Kota Se - Kaltim untuk Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan dan arahan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Paparan dan arahan dari narasumber Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Pemaparan Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 oleh seluruh Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah (PD) terhadap materi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan, maka pada ;

Hari/ Tanggal : Rabu, 07 April 2021

Jam : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Hotel Bumi Senyuir (Sungai Pinang Room)

Jl. Pangeran Diponegoro No. 17-19, Kota Samarinda

Forum Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Timur

**MENYEPAKATI**

- KESATU : Menyetujui program/ kegiatan dan indikator kinerja yang disertai target serta rencana kebutuhan, yang diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah (PD) ;
- KEDUA : Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini ;
- KETIGA : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I dan Lampiran II), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur ; dan
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan sebagai bahan untuk pembahasan RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2022.
- KELIMA : Agar setiap Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten/ Kota menyusun Pemetaan Potensi Unggulan dalam upaya promosi investasi.
- KEENAM : Dalam kegiatan promosi baik dalam maupun luar daerah agar DPMPTSP Kabupaten/ Kota berperan aktif atau ikut serta mempromosikan potensi-potensi daerahnya.
- KETUJUH : Terkait dengan kegiatan promosi, stand / tempat ditanggung oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,  
  
**DUGUH HARJANTO, S.STP., M.SI**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 197908101998021001



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website: <http://dpmptsp.kaltimprov.go.id> email : [humas@dpmptsp.kaltimprov.go.id](mailto:humas@dpmptsp.kaltimprov.go.id)  
email PTSP : [iso.dpmptsp@gmail.com](mailto:iso.dpmptsp@gmail.com), [humas.dpmptspkaltim@gmail.com](mailto:humas.dpmptspkaltim@gmail.com) twitter : @dpmptsp\_kaltim  
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp : (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446  
SAMARINDA 75112

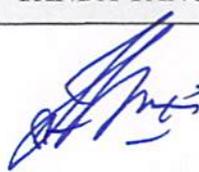
## LAMPIRAN I

### Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Perencanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi, Kab / Kota Se - Kaltim

1. Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan perizinan DPMPTSP Provinsi Kaltim dengan melakukan diklat kepada petugas di Kab/Kota dalam penggunaan aplikasi OSS RBA, terutama dalam memberikan layanan berbantuan kepada masyarakat pemohon.
2. Penyesuaian Program/Kegiatan sesuai Kepmen 050/2019 dan Penyusunan Renstra Kabupaten/Kota sehingga cascading antara Program/Kegiatan Prioritas Provinsi dengan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota sehingga terjadinya keselarasan kegiatan antara Pemerintahan Provinsi dan Kab/Kota.
3. Mendorong dan mendukung pengembangan IKN dan Buluminung dan hal menarik calon investor dan pada saat ini sedang disusun master plan IKN oleh Bappenas, agar apa yang telah disusun tetap dapat bersinergi dengan apa yang direncanakan oleh Kabupaten PPU terutama Kawasan Peruntukan Industri Buluminung.
4. Membuat sebuah regulasi yang meninjau kembali Percepatan Kemudahan Berusaha yang bersinergi antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
5. Mendukung antara Pemerintahan Provinsi, Kab/ Kota dengan Pemerintahan Pusat untuk mengawal Investor yang tertarik terutama ketika IKN sudah ditetapkan di Kalimantan Timur.
6. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kab/ Kota dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi di daerah.
7. Melakukan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUMPD) yang bersinergi dengan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur.
8. Meningkatkan sinergitas antara Pemerintahan Pusat dan Provinsi untuk mendukung Infrastruktur pada Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPIK).
9. Mendukung kegiatan DPMPTSP Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur dalam hal pemberian informasi tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik kepada Kab/Kota.

**Menyetujui,**  
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Kalimantan Timur

**LAMPIRAN II**

No.	NAMA	JABATAN	UNSUR PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	<b>Ir.Hidayanti Darma, M.P.</b>	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Bappeda Prov. Kaltim	
2	<b>Radiansyah, S.H., M.Hum</b>	Sekretaris DPMPTSP Prov. Kaltim	Sekretariat DPMPTSP Prov. Kaltim	
3	<b>Nino Rozaldi, S.E.</b>	Kepala Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P2IPM) DPMPTSP Prov. Kaltim	
4	<b>Drs.Didi Wahyudi</b>	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan (LP2N) DPMPTSP Prov. Kaltim	
5	<b>Noer Adenany, S.Sos.,M.Si.</b>	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal	Bidang Promosi Penanaman Modal (P2M) DPMPTSP Prov. Kaltim	
6	<b>Sanusi Saudek, S.T</b>	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan	Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal (DALAK) DPMPTSP Prov. Kaltim	
7	<b>Dra.Otty Eka Permana Lestari, S.H., MAP.</b>	Kepala Bidang Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan	Bidang Layanan Pengaduan, Advokasi dan Informasi Perizinan (YANDU) DPMPTSP Prov. Kaltim	